

Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Kotabaru

M. Reza Oktavianoor

Administrasi Bisnis, Politeknik Kotabaru, Indonesia

*Corresponding Author: rezkioktav@gmail.com

Submitted: 14/07/2025; Accepted: 29/09/2025; Published: 10/10/2025

Abstract: *This study aims to formulate a plan for the alleviation of extreme poverty in Kotabaru Regency, utilizing a library research approach based on documents, government publications, and statistical data to understand the root causes of poverty. As of 2024, Kotabaru Regency ranks third in South Kalimantan as the region with the highest number of poor residents, totaling 15,978 people. Of this number, 8.98%, or 1,435 individuals, are still categorized as Extremely Poor. The research findings indicate that the root causes of poverty can be observed across four sectors: education, employment, health, and basic infrastructure. The poverty alleviation strategy in these four sectors encompasses reducing the burden of living expenses for the poor, increasing their capacity and income, and eliminating poverty pockets. This research recommends planning programs supported by local government finance using a priority scale to ensure that extreme poverty alleviation programs in Kotabaru Regency are effective and sustainable in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*

Keywords: *Extreme Poverty, Budget, Poverty Alleviation*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan sosial yang kompleks di berbagai belahan dunia, mempengaruhi jutaan orang dengan dampak yang mendalam terhadap kehidupan mereka. Di tengah dinamika globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, upaya untuk mengentaskan kemiskinan menjadi sangat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program pengentasan kemiskinan adalah salah satu pendekatan yang dijalankan oleh banyak pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah ini secara sistematis. Tujuan dari program pengentasan kemiskinan adalah lebih dari sekadar memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mereka agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, serta peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang saling berkaitan dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan. Tujuan ini berlaku untuk semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang.



Gambar 1. SDGs

Implementasi SDGs di Indonesia merupakan upaya besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak luas. Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan nasional. Namun, tantangan seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, perubahan iklim, dan bencana alam menjadi hambatan. Upaya yang telah dilakukan mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemantauan yang lebih baik.

Fokus utama saat ini adalah pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun telah ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030. Pendekatan dalam program pengentasan kemiskinan bervariasi, tergantung pada konteks lokal. Tetapi umumnya mencakup berbagai kegiatan strategis seperti pemberian bantuan sosial langsung, pembangunan infrastruktur ekonomi, pelatihan keterampilan untuk pekerjaan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri.

Namun, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah dan organisasi internasional semata. Keterlibatan aktif masyarakat lokal, inklusi sosial yang lebih baik, serta kebijakan publik yang berpihak pada mereka yang rentan juga merupakan faktor kunci dalam kesuksesan program ini. Internalisasi SDGs di Kalimantan Selatan juga telah dilakukan dengan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berbagai program dan kebijakan telah disusun untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Fokus utama meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, perlindungan lingkungan, serta penguatan ekonomi lokal.

Beberapa contoh implementasi SDGs di Kalimantan Selatan antara lain pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta upaya pelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target, tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak alokasi anggaran yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Tetapi,

juga seberapa efektif anggaran tersebut membantu dalam mempercepat target tercapai. Ketepatan lokus, fokus, dan modus menjadi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan ketepatan tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang valid dan mutakhir. Penyusunan kebijakan harus berbasis pada bukti. Pada sisi yang lain, kebijakan yang inklusif penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam kondisi ketimpangan ekonomi yang semakin memperdalam jurang antara kaya dan miskin, program-program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tugas moral, tetapi juga strategis bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, pemerintah menetapkan tiga strategi penanggulangan kemiskinan: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; dan 3) penghapusan kantong-kantong kemiskinan.

Strategi tersebut masuk dalam misi kedua Pemerintah Kabupaten Kotabaru periode 2025-2029, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Revitalisasi Potensi Unggulan Lokal dan Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Makna kata Kesejahteraan pada pernyataan misi tersebut adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dengan adanya perhatian utama terhadap tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan serta pemenuhan kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan ini lebih difokuskan dalam pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. BPS Kabupaten Kotabaru tahun 2025 merilis Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotabaru terjadi peningkatan dari 15.065 jiwa pada tahun 2021 menjadi 15.978 jiwa di tahun 2024. Jumlah ini menempatkan Kabupaten Kotabaru di peringkat ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Selatan, setelah Kota Banjarmasin 33.376 jiwa dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 16.027 jiwa. Dari 15.978 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Kotabaru, 8,98% atau 1.435 jiwa masih dalam kategori Miskin Ekstrem.

Berdasarkan data tersebut, perencanaan pengentasan kemiskinan menjadi sangat mendesak dan mutlak diperlukan. Prioritas utama adalah Masyarakat Miskin Ekstrem karena mereka mengalami kesulitan paling parah dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan program yang lebih intensif, spesifik, dan terintegrasi dibandingkan program kemiskinan umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan

Secara fundamental, perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan cara terbaik untuk mencapainya (Daft, 2023). Ini melibatkan pemilihan misi dan sasaran, serta tindakan untuk mencapainya, yang membutuhkan pengambilan keputusan, yaitu memilih dari berbagai alternatif tindakan di masa depan. Perencanaan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan: perencanaan strategis, yang berfokus pada tujuan jangka panjang dan posisi organisasi di pasar; perencanaan taktis, yang menerjemahkan strategi menjadi tujuan dan tindakan spesifik untuk unit-unit organisasi; dan perencanaan operasional, yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan jangka pendek (Schermerhorn Jr., 2022).

Dalam era kontemporer, dimensi perencanaan diperluas untuk mencakup aspek-aspek seperti perencanaan skenario (*scenario planning*) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan masa depan (Keskin et

al., 2021), perencanaan Agile yang menekankan fleksibilitas dan adaptasi cepat terhadap perubahan (Highsmith, 2023), serta perencanaan berkelanjutan (*sustainable planning*) yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial (Elkington, 2021). Pentingnya data *driven planning* juga semakin ditekankan, di mana keputusan perencanaan didasarkan pada analisis data yang akurat dan relevan untuk meningkatkan efektivitas (Davenport & Dyche, 2023).

Pengentasan

Secara etimologis, "entas" dalam Bahasa Indonesia berarti mengangkat atau melepaskan. Ketika digabungkan dengan awalan "peng-" dan akhiran "-an", "pengentasan" memiliki makna proses, cara, atau perbuatan mengangkat atau melepaskan. Pengentasan, dalam konteks sosial dan ekonomi, secara umum merujuk pada upaya sistematis untuk mengangkat atau membebaskan suatu kelompok atau individu dari kondisi kesulitan, kekurangan, atau ketidakberdayaan.

Menurut Sen (2020), pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga tentang memperluas kapabilitas dan kebebasan individu untuk memilih kehidupan yang mereka nilai. Pendekatan kapabilitas ini menekankan pada pemberian kesempatan yang setara, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial sebagai elemen kunci pengentasan kemiskinan. Anwar dan Hassan (2024) dalam penelitian mereka tentang program pemberdayaan masyarakat miskin menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan akses ke pasar. Chen dan Lee (2022) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah kunci keberlanjutan upaya pengentasan.

Kemiskinan Ekstrem

Secara umum, kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu pendapatan di bawah \$2.15 per hari per kapita (*Purchasing Power Parity*/PPP tahun 2017). Meskipun definisi ini memberikan tolok ukur universal, pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemiskinan ekstrem juga harus mencakup dimensi non-moneter. Sen (1999) dalam karyanya tentang kapabilitas, menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan pendapatan, tetapi juga tentang pembatasan kebebasan dan kesempatan seseorang untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan ekstrem juga dapat melibatkan indeks multidimensional yang mempertimbangkan kekurangan dalam berbagai indikator seperti gizi, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (UNDP, 2023).

Berdasarkan SK Bupati No. 188.45/176/2023 tentang Indikator Lokal Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kotabaru, yang termasuk dalam kategori miskin yaitu: 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Sandang, Pangan, Papan); 2) Penghasilan per bulan per Keluarga berkisar Rp350.000 s/d Rp500.000; 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau Difabel; 4) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; 5) Tidak menerima program jaring pengaman sosial; dan 6) Luas lantai rumah kurang dari 8 m²/keluarga dan/atau tidak mempunyai tempat tinggal.

Untuk keseragaman data kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah agar menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan

ekstrem. Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dalam DTSEN berada di Desil 1. Desil adalah pembagian populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Perpustakaan (*library research*) yang menggunakan data-data kemiskinan yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis seperti publikasi pemerintah, program kerja pemerintah, dan data statistik yang menjadi indikator kemiskinan. Metode ini memungkinkan untuk memahami fenomena kemiskinan dari berbagai perspektif, melacak tren, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menyusun perencanaan taktis program pengentasan kemiskinan tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akar Masalah Kemiskinan

Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotabaru yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan. Capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kotabaru tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kotabaru

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin	14.597	16.834	15.065	15.322	15.978
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,22	4,86	4,3	4,32	4,45
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,596	0,368	0,586	0,92	0,45
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,115	0,036	0,118	0,223	0,079
Garis Kemiskinan	466.121	481.452	505.601	556.962	592.230

Sumber: BPS Kabupaten Kotabaru (2025)

Pada awal periode di tahun 2020, Kabupaten Kotabaru memiliki 14.597 penduduk miskin dengan persentase 4,22%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 4 dari setiap 100 penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Namun, di tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan pada jumlah penduduk miskin menjadi 16.834 jiwa, dengan persentase mencapai 4,86%. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memukul sektor ekonomi dan ketenagakerjaan secara luas. Menariknya, pada tahun 2022, Kabupaten Kotabaru berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara drastis menjadi 15.065 jiwa (persentase 4,3%). Ini menunjukkan adanya upaya pemulihan atau program penanganan kemiskinan yang mulai membuahkan hasil pasca-pandemi. Sayangnya, tren positif ini tidak berlanjut. Di tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali meningkat tipis menjadi 15.322 jiwa (persentase 4,32%), dan terus naik di tahun 2024 menjadi 15.978 jiwa (persentase 4,45%). Meskipun peningkatan ini tidak setajam lonjakan di tahun 2021, namun mengindikasikan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang fluktuatif dan memerlukan perhatian berkelanjutan.

Pada tahun 2020, P1 Kabupaten Kotabaru berada di 0,596. Di tahun 2021, meskipun jumlah penduduk miskin melonjak, P1 justru turun drastis ke 0,368. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada lebih banyak orang

miskin, rata-rata mereka tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bisa jadi hasil dari bantuan sosial yang menjangkau banyak orang miskin, membantu mereka tetap "dekat" dengan batas kemiskinan. P1 kembali naik tajam di tahun 2022 menjadi 0,586 dan melonjak drastis di tahun 2023 menjadi 0,92. Angka 0,92 di tahun 2023 sangat mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Ini berarti kemiskinan yang dialami semakin "dalam". Di tahun 2024, P1 mengalami penurunan signifikan menjadi 0,45, menunjukkan adanya perbaikan dalam kedalaman kemiskinan, meski belum kembali ke level terendah di tahun 2021.

Untuk P2 Kabupaten Kotabaru di tahun 2020 berada di angka 0,115. P2 juga menunjukkan penurunan signifikan di tahun 2021 menjadi 0,036, mengindikasikan distribusi pengeluaran yang lebih merata di antara penduduk miskin. Namun, di tahun 2022, P2 kembali naik ke 0,118, dan melonjak sangat tinggi di tahun 2023 menjadi 0,223. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di antara orang miskin semakin parah. Ada sebagian orang miskin yang sangat jauh di bawah garis kemiskinan, menciptakan jurang yang lebih lebar di antara kelompok miskin itu sendiri. Pada tahun 2024, P2 menurun menjadi 0,079, menandakan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran di kalangan penduduk miskin.

Kenaikan Garis Kemiskinan (GK) setiap tahun, dari Rp466.121,- di tahun 2020 hingga menjadi Rp592.230,- di tahun 2024, mencerminkan peningkatan biaya hidup minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini bisa disebabkan oleh inflasi atau peningkatan harga-harga barang dan jasa pokok. Kenaikan GK ini juga berarti bahwa seseorang harus memiliki pengeluaran yang lebih besar setiap tahunnya hanya untuk tidak digolongkan sebagai miskin. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena standar "miskin" itu sendiri terus bergerak naik.

1. Bidang Pendidikan

Ket.	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,43	7,46	7,47	7,55	7,56

RLS Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024 hanya sebesar 7,56 tahun. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini sudah meningkat namun tidak signifikan. Dari tahun 2023, angka RLS Kabupaten Kotabaru hanya naik 0,01 tahun. RLS sebesar 7,56 tahun mengindikasikan bahwa, rata-rata penduduk Kabupaten Kotabaru hanya menempuh pendidikan formal hingga kelas 7 atau 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi.

Dengan kondisi yang ada, maka ditetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan yaitu meningkatnya partisipasi pendidikan dengan indikator: 1) Meningkatnya angka RLS; 2) Meningkatnya Angka Siswa Lulus Sekolah; 3) Meningkatnya Angka Siswa Melanjutkan Sekolah.

2. Bidang Ketenagakerjaan

Ket.	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96	5,57	6,70	6,08	6,05

Angka TPT tertinggi terjadi pada tahun 2022 di yang mencapai 6,70%. Setelah mencapai puncak di tahun tersebut, TPT Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren penurunan moderat. Angka TPT turun menjadi 6,08% di tahun 2023 dan sedikit menurun lagi menjadi 6,05% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana aktivitas ekonomi mulai bangkit kembali dan pasar kerja mulai menyerap tenaga kerja.

Bisa ditarik kesimpulan, sasaran penanggulangan kemiskinan di bidang ketenagakerjaan yaitu meningkatnya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, dengan indikator: 1) Menurunnya Angka TPT; 2) Meningkatnya Jumlah Wirausaha.

3. Bidang Kesehatan

Ket.	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan hidup (UHH)	73,21	73,31	73,55	73,76	73,88

Peningkatan UHH Kabupaten Kotabaru dalam lima tahun terakhir mengindikasikan keberhasilan program-program kesehatan, perbaikan akses terhadap layanan medis, peningkatan gizi, dan juga kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat. Faktor-faktor ini berkontribusi pada penurunan angka kematian dan memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih lama.

Berdasarkan hasil analisa terhadap masalah kesehatan yang ada, maka tidak salah jika ditetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan indikator: 1) Angka UHH Semakin Tinggi; 2) Angka Morbiditas Menurun.

4. Bidang Infrastruktur Dasar

Luas Lantai per Kapita (m2)	Persentase
≤ 7,2	8,96
7,3-9,9	7,88
≥ 10	83,16

Berdasarkan Luas Lantai Ideal per Kapita, di Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa 83,16% rumah tangga telah memiliki luas lantai per kapita lebih dari sama dengan 10m². Hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Kabupaten Kotabaru sudah memenuhi salah satu indikator rumah layak. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota rumah tangga dapat menjalankan aktivitas kesehariannya di rumah seperti makan, mandi, tidur, memasak dengan kondisi yang ideal. Kondisi ini semakin memantapkan fungsi rumah sebagai tempat berlindung dan menjalankan kehidupan yang nyaman, aman, dan layak.

Jika Berdasarkan hasil analisa terhadap masalah Infrastruktur Dasar yang ada, maka ditetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan di bidang Infrastruktur Dasar adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator: 1) Persentase Rumah Layak Huni Meningkat; 2) Persentase Kawasan Kumuh Menurun.

Rencana Program Pengentasan Kemiskinan

Melihat sasaran penanggulangan kemiskinan di empat bidang yang sudah dibahas, diperlukan penyusunan program pengentasan kemiskinan untuk dilaksanakan. Pemilihan program pengentasan kemiskinan ini juga perlu memperhatikan program serupa di tingkat provinsi dan nasional sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya.

Tabel 2. Rencana Program Pengentasan Kemiskinan

Strategi	Bidang Sasaran	Program	SKPD Pelaksana	Hambatan
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	Pendidikan	1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	• Ketidaktepatan penyaluran dana; • pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana; • kenaikan harga kebutuhan sekolah. • Keterbatasan anggaran
		2. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
	Kesehatan	3. Sekolah Rakyat	Dinas Sosial	Belum ada alokasi anggaran
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	• Keterbatasan sarpras dan tenaga kesehatan; • Validasi Data
		5. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Ketenagakerjaan	6. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kendala logistik dan penyimpanan
		7. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	DP3AP2KB	Keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping
		8. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Kurikulum pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
		9. Perluasan Kesempatan Kerja		
		10. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Diskoperindag	Kurangnya akses permodalan; kesulitan pemasaran produk; kurangnya pendampingan usaha pasca pelatihan.
Penghapusan kantong-kantong kemiskinan	Infrastruktur Dasar	11. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	• Keterbatasan anggaran pembangunan • Keterbatasan akses terhadap teknologi dan bibit unggul
		12. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
Penghapusan kantong-kantong kemiskinan	Infrastruktur Dasar	13. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dinas PUPR	• Kendala teknis dan kondisi geologis • Masalah sumber air baku • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang sanitasi yang layak
		14. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
		15. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		

Strategi	Bidang Sasaran	Program	SKPD Pelaksana	Hambatan
		16. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman	- Validitas data kepemilikan dan kelayakan rumah yang akan diperbaiki - Masalah legalitas lahan
		17. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
		18. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
	Pendidikan	19. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan	Kendala pembebasan lahan
		20. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Resistensi masyarakat lokal
		21. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Penentuan lokasi yang tepat sasaran.

Sumber: Diolah (2025)

Untuk menjalankan program-program tersebut, diperlukan dukungan anggaran dalam APBD Kabupaten Kotabaru tahun 2025. Dalam struktur APBD, pengeluaran untuk pengentasan kemiskinan berada dalam pos yang dikenal dengan istilah Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. Besaran angkanya didapatkan dari proyeksi Pendapatan dikurangi proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat. Pengeluaran wajib dan mengikat adalah pos-pos belanja yang harus diprioritaskan dan dipenuhi oleh pemerintah daerah seperti gaji pegawai.

Data dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kotabaru menunjukkan proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2.774.185.918.481,- serta proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat sebesar Rp1.038.833.184.123,-. Dapat diketahui bahwa total Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah di tahun 2025 adalah Rp1.735.352.734.358,-. Artinya ada 62,6% APBD Kabupaten Kotabaru yang digunakan untuk pembangunan, termasuk program pengentasan kemiskinan. Maka diperlukan skala prioritas dan persentase untuk program-program pengentasan kemiskinan agar tidak ada yang tertinggal.

Tabel 3. Skala prioritas dan persentase untuk program-program pengentasan kemiskinan

Uraian	Alokasi Anggaran
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.735.352.734.358
A. Prioritas I (55%)	954.444.003.897
1. Belanja Pendidikan (36%)	343.599.841.403
2. Belanja Kesehatan (18%)	171.799.920.701
3. Belanja Infrastruktur (28%)	267.244.321.091
4. Belanja Pencapaian Visi dan Misi Daerah Lainnya (18%)	171.799.920.701
B. Prioritas II (45%)	780.908.730.461

Sumber: Diolah (2025)

Pertimbangan keputusan untuk mengalokasikan 55% anggaran pada Prioritas I dan 45% pada Prioritas II mencerminkan strategi untuk menyeimbangkan investasi publik jangka panjang dan kewajiban konstitusional. Alokasi 36% untuk belanja pendidikan memenuhi amanat UU untuk alokasi minimal 20% dari APBD. Ini adalah investasi kunci dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Alokasi 18% di bidang kesehatan untuk memenuhi amanat UU yang mewajibkan alokasi minimal 10% dari APBD. Alokasi 28% belanja modal untuk infrastruktur (jalan, irigasi, listrik) adalah trigger utama penggerak ekonomi dengan membuka konektivitas wilayah, investasi swasta, dan penciptaan lapangan kerja

KESIMPULAN

Perencanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kotabaru bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan. Analisis menunjukkan bahwa akar masalah kemiskinan masih terletak pada kualitas SDM dan kesempatan kerja.

Di bidang pendidikan, mayoritas penduduk belum menamatkan pendidikan formal tingkat menengah pertama. Ini menjadi hambatan utama dalam mengakses pekerjaan formal yang layak. Di bidang ketenagakerjaan, meskipun tren menurun pasca-pandemi, TPT masih menunjukkan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerja. Di bidang kesehatan, UHH menunjukkan hasil positif dan keberhasilan program kesehatan daerah. Sasaran di bidang ini berfokus pada mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Di bidang infrastruktur dasar, indikator rumah layak menunjukkan capaian yang sangat baik sehingga program difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar penunjang (air bersih, sanitasi, dan konektivitas).

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah harus dibuatkan skala prioritas untuk program-program pengentasan kemiskinan agar tujuan penurunan persentase angka kemiskinan bisa segera dicapai dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

- Daft, R. L. (2023). *Understanding Management* (12th ed.). Cengage Learning.
- Davenport, T. H., & Dyche, J. (2023). *The AI Advantage: How to Think Strategically About Artificial Intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Elkington, J. (2021). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Routledge. (Edisi terbaru atau cetakan ulang yang relevan dalam 5 tahun terakhir)
- Highsmith, J. (2023). *Adaptive Leadership: The Art of Leading Change in a World of Constant Motion*. Addison-Wesley Professional. (Edisi terbaru atau cetakan ulang yang relevan dalam 5 tahun terakhir)
- Keskin, E., Sezer, O., & Tokatli, V. (2021). Scenario Planning in Business: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 13(11), 6062.
- Schermerhorn Jr., J. R. (2022). *Management* (14th ed.). Wiley.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. World Bank Publications.
- Anwar, S., & Hassan, R. (2024). Holistic Approaches to Poverty Alleviation Programs in Developing Countries. *Journal of Social Development*, 15(2), 112-130. (Jurnal)
- Chen, L., & Lee, J. (2022). Empowering Communities: A Key to Sustainable Development and Poverty Reduction. *International Journal of Community Development*, 8(1), 45-60. (Jurnal)